Buku yang dikerjakan secara teliti dari karya disertasi penulisnya ini, tak terelakkan berhasil menambahkan khasanah pengetahuan kita tentang dinamika politik di Aceh dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Dinamika konfliktual dan konsensus politik antar-aktor yang direkam dalam buku ini, merupakan bagian dari coraknya yang khas praktik otonomi daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- **Dr M Alfan Alfian M, M.Si**, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta

BUKU yang diangkat dari karya disertasi penulisnya di Program Doktor Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia ini membahas tentang dinamika hubungan pemerintah pusat dengan Aceh pasca-MoU Helsinki dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2006. Pertimbangan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk kepentingan pemerintah pusat adalah agar mantan GAM belajar berintegrasi dengan masyarakat dan belajar memahami berbagai aturan yang berlaku secara nasional, melahirkan pemimpin nasional yang berasal dari partai politik nasional dan partai politik lokal, dan untuk memperkokoh perdamaian di Aceh. Kepentingan pemerintah daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua masyarakat Aceh berperan dalam proses politik, memotivasi pemerintah Aceh melaksanakan pembangunan, dan partisipasi pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan nasional (*local partisipation*). Namun, realitasnya, hubungan pemerintah pusat dengan Aceh kembali diwarnai konflik terkait isu bendera Aceh. Konflik yang terjadi isu bendera Aceh adalah konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh (gubernur Aceh dan DPRA). Kendati demikian, bukan tidak ada jalan keluar dalam masalah ini.●

PENJURU ILMU
KHASANAH &PENCERAH

SOCIAL SCIENCE 18+
ISBN 978-602-0967-42-4
9 786020 967424
HARGA P JAWA RP100.000,-

Politik desentralisasi di indonesia ASRAN JALAL

Politik Desentralisasi di Indonesia

Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

ASRAN JALAL